



Alkes RS Pratama Tangguwisia Dianggarkan Rp 7 M, Terpakai Hanya Rp 4 M



Nyoman Sutjidra

dr. Nyoman Sutjidra, Sp.O.G., didampingi Kabag Humas dan Protokol Sekkab Buleleng Made Supartawan, Jumat (11/9) kemarin.

Sutjidra mengatakan, dari dokumen perencanaan, seluruh pengadaan alkes rumah sakit pratama ini menelan anggaran Rp 7 miliar. Dana ini sepenuhnya bersumber dari APBN melalui program anggaran tugas pembantuan (TP). Setelah dana itu disetujui termasuk total anggaran untuk fisik gedung, untuk anggaran alkes itu tidak bisa digunakan seratus persen. Dari total anggarannya Rp 4 miliar yang bisa dibelikan alkes untuk rumah sakit pratama. Sementara itu, sisanya lagi Rp 3 miliar anggarannya tidak bisa dibelanjakan. Hal ini karena pengadaan alkes untuk rumah sakit pratama menggunakan sistem tender E-Katalog. Aturan ini sendiri dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Atas kondisi ini, hanya anggaran yang masuk dalam E-Katalog yang bisa direalisasikan. Sementara yang tidak tercantum dalam E-Katalog, otomatis anggarannya tidak terpakai dan konsekuensinya harus dikembalikan ke kas negara.

“Anggaran yang masuk E-Katalog Rp 4 miliar, dan anggaran Rp 3 miliar itu tidak masuk E-Katalog, sehingga kita tidak gunakan dan dikembalikan ke kas negara,” katanya.

Menurut pejabat asal Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan ini anggaran untuk pengadaan alkes Rp 4 miliar itu dapat memenuhi kebutuhan vital di rumah sakit pratama. Bahkan, dengan kondisi ini target pemerintah mengoperasikan rumah sakit pratama tahun 2016 mendatang tetap bisa dicapai. Sementara kalau anggaran yang tidak bisa direalisasikan itu kebanyakan untuk membeli kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya menunjang operasional rumah sakit. (kmb38)

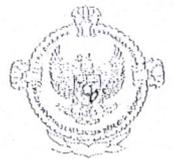
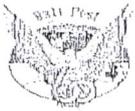
Singaraja (Bali Post) –

Pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk rumah sakit pratama di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt hanya menggunakan anggaran Rp 4 miliar dari total anggaran untuk alkes sebesar Rp 7 miliar. Sementara sisanya Rp 3 miliar tidak bisa dialokasikan. Otomatis sisa anggaran itu dikembalikan ke kas negara.

Meskipun tidak seratus persen anggarannya bisa dialokasikan, dipastikan kebutuhan rumah sakit pratama itu terpenuhi dengan maksimal untuk bisa dioperasikan tahun 2016 mendatang. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Buleleng

Edisi : Sabtu, 12 September 2015

Hal : 17



APBD Perubahan 2015 Naik 12,23 Persen

Tabanan (Bali Post) -

Pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2015 Kabupaten Tabanan mengalami kenaikan 12,23 persen atau Rp 174,858 miliar. Sementara APBD murni 2015 mencapai 1,429 triliun, dan sampai semester pertama telah terealisasi 52,94 persen atau Rp 756,770 miliar. Rinciannya, realisasi belanja tidak langsung 57,27 persen dan belanja langsung 41,09 persen.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tabanan berencana mengalokasikan dana tersebut untuk peningkatan belanja sertifikasi guru, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa, *cost sharing* JKBM, dan belanja hibah penanganan pilkada. "Sisanya digunakan untuk peningkatan belanja-belanja program dan kegiatan prioritas serta mendukung peningkatan kinerja aparatur dalam mempertahankan predikat WTP yang telah diperoleh Tabanan," papar Penjabat Bupati I Wayan Sugiada, Jumat (11/9) kemarin.

Didampingi Kepala Bappeda Tabanan, Sugiada mengatakan, jika dilihat dari realisasi APBD murni 2015, secara keseluruhan belanja telah melampaui target serapan anggaran 50 persen pada semester I. Namun, untuk serapan belanja langsung diakuinya masih sedikit di bawah target. Ini dikarenakan serapan dana alokasi khusus (DAK) masih sangat rendah disebabkan persoalan keterlambatan petunjuk teknis dan permasalahan pengadaan barang

jasa seperti keterlambatan terbitnya *e-katalog*, proses lelang dan minimnya penyedia untuk melakukan amprah uang muka proyek fisik. Sementara proses administrasi keuangan sudah dilakukan dengan baik.

Saat penetapan APBD Perubahan 2015, penjabat bupati telah memaparkan penerimaan daerah khususnya untuk pendapatan asli daerah (PAD) dalam rancangan anggaran perubahan 2015 sebesar Rp 264 miliar lebih. Anggaran pada pos pendapatan ini terdiri atas pajak daerah Rp 92,974 miliar, retribusi Rp 42 miliar, dan PAD lain-lainnya yang sah Rp 121,658 miliar dari jumlah pendapatan daerah Rp 1,596 triliun.

Sementara besaran belanja daerah dianggarkan Rp 1,702 triliun terdiri atas belanja langsung Rp 561,616 miliar dan belanja tidak langsung Rp 1,140 triliun. "Ini berarti pada rancangan APBD perubahan terdapat defisit. Besarnya defisit direncanakan ditutupi dari sisa lebih pagu anggaran (silpa) 2014," imbuh Sugiada.

Ia menyadari selama ini masih ada kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan. "Kondisi ini tentu saja memberikan tekanan agar dalam pengalokasian anggaran lebih pada program prioritas dan program yang dibutuhkan," jelasnya. Namun demikian, dengan sumber daya yang ada pihaknya berupaya mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. (kmb28)

Edisi : Sabtu, 12 September 2015

Hal : 14



Dugaan Korupsi di PDAM Karangasem

Penetapan Tersangka Tunggu Sprindik

Denpasar (Bali Post) -

Walau pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menyatakan bahwa penetapan tersangka kasus PDAM Karangasem tinggal selangkah lagi, namun hingga saat ini belum ada peningkatan status tersebut. Kini, muncul statemen bahwa penetapan tersangka yang konon calonnya pejabat utama di lingkungan PDAM, tinggal menunggu sprindik (surat perintah penyidikan) dari pejabat terkait.

Informasi Jumat (11/9) kemarin, lamanya penetapan tersangka ini lantaran sprindiknya belum turun. "Ekspos kan sudah dilakukan, dan kesimpulannya bahwa kasus ini sudah dipastikan naik ke penyidikan. Namun surat perintah penyidikan belum turun-turun," sebut sumber di kejaksaan, Jumat kemarin.

Salah satu jaksa yang menangani kasus ini, Raka Arimbawa, saat dimintai konfirmasi mengatakan memang masih menunggu sprindik. "Masih sibuk, masih menunggu sprindiknya. Memang saat ekspos sudah

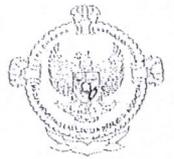
dipastikan naik ke penyidikan dan ada tersangka, namun kami masih menunggu sprindik," katanya.

Beberapa waktu lalu, Kajati Bali Momock Bambang Sumiarso memastikan kasus ini sudah ekspos. Bahkan, sudah menetapkan satu tersangka. Dia juga mengatakan ekspos malah sudah dilakukan sebelum Lebaran. Hal senada diungkapkan Aspidus Erna Norma. Dia memastikan hal yang sama, namun tak mau menyebutkan nama tersangka yang sudah ditetapkan.

Terkait dengan kasus ini, Kasi Penyidikan Pidsus Akmal Kodrat mengatakan, kasus yang terjadi bukan pengadaan mesin. Yang didapatkan dugaan korupsinya adalah kasus pengadaan lahan. "Yang terjadi kerugian negara adalah pengadaan lahannya, bukan pengadaan mesin atau lainnya," imbuhnya saat itu. Namun, dia tidak mau merinci nilai kerugian negara, dengan alasan nanti akan dimatangkan dulu untuk kemudian akan diumumkan secara resmi. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 12 September 2015

Hal : 3



Proyek Tukad Mati Dilanjutkan

Mangupura (Bali Post) -

Proyek normalisasi Tukad Mati mulai menemukan titik terang, dengan keluarnya surat Gubernur Bali Made Mangku Pastika nomor: 522/1017/Dishut-4 tertanggal 7 September 2015. Isi surat yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia itu perihal pengajuan permohonan penegasan pembangunan *long storage*. Intinya proyek penanggulangan banjir itu dapat dilanjutkan.

Surat tersebut merupakan jawaban dari surat permohonan Penjabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka, Nomor : 610/3740/Sekret, tanggal 4 September 2015 ke Gubernur Bali. Surat itu bertujuan agar proyek normalisasi Tukad Mati bisa dilanjutkan.

Hal. 19

Blok Perlindungan

Blok Perlindungan

Dari Hal. 1

Dalam proyek penanggulangan banjir itu hanya diusulkan blok pemanfaatan khusus pada rencana pembangunan *long storage* di alur muara Tukad Mati sepanjang 1.700 meter dengan lebar 50 meter.

Surat yang juga merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : S.431/VII-KKBLH/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Normalisasi Tukad Mati di Blok Perlindungan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kabupaten Badung, menegaskan tiga poin penting.

Poin pertama, berdasarkan kajian teknis bahwa penyempitan alur Tukad Mati oleh sedimentasi dan sampah telah mengakibatkan banjir pada setiap musim hujan di kawasan pariwisata Kuta,

sehingga kegiatan penataan alur sungai mendesak untuk segera dilakukan. Kedua, mengingat areal tersebut masuk dalam blok perlindungan Tahura Ngurah Rai, sehingga perlu diadakan revisi perubahan blok dan kerja sama yang saat ini sedang dikerjakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bali.

Kemudian yang ketiga, sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat rencana pengelolaan Tahura Ngurah Rai tahun 2012 ditetapkan/disahkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), maka pihaknya mohon sebelum diselesaikan revisi perubahan blok dan kerja sama ada penegasan bahwa pelaksanaan pembangunan *long storage* di muara Tukad Mati di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dapat dilaksanakan.

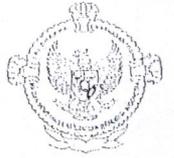
Menanggapi surat tersebut, Kepala Bidang Pengairan Di-

nas Bina Marga dan Pengairan (BMP) A.A. Gde Dalem, Jumat (11/9) kemarin menyatakan pembangunan *long storage* untuk mengantisipasi dampak banjir di kawasan pariwisata Kuta sudah mendapat lampu hijau. "Terutama dari pihak Pemprov Bali yang sebelumnya melalui Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Bali menghentikan sepihak proyek," katanya.

Lantas kapan proyek tersebut akan dilanjutkan? Gde Dalem tidak bisa memberikan kepastian. Sebab, pihaknya berencana akan meminta penegasan serupa ke pusat. Jika surat penegasan telah dikantongi, makanya pihaknya bisa yakin untuk melanjutkan proyek yang menelan anggaran Rp 47 miliar tersebut. "Kami masih tunggu penegasan dulu," ucapnya singkat. (kmb27)

Edisi : Sabtu, 12 September 2015

Hal : 1 dan 19



Terkait Pabrik Beton Cor

Dewan Ingatkan

Tim Investasi

Tak Gegabah

Beri Rekomendasi

Singaraja (Bali Post) -

Menyusul dilengkapinya berkas permohonan rekomendasi izin prinsip, kemudian tim investasi telah menelusuri lokasi pembuatan beton cor di Desa Bungkulan, mendapat tanggapan serius kalangan DPRD Buleleng. Wakil rakyat Buleleng mengingatkan tim investasi agar tidak gegabah merekomendasikan usaha tersebut. Pasalnya, lokasi pembuatan beton cor tersebut jelas-jelas sebagai kawasan wisata dan budidaya sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Wakil Ketua II DPRD Buleleng I Ketut Susila Umbara mengatakan, Jumat (11/9) kemarin, dari dokumen RTRW Kabupaten, Desa Bungkulan masuk zone pariwisata dan budidaya. Namun dalam proses pemberian izin usaha pembuatan beton cor itu, pemerintah daerah diduga menyebutkan Bungkulan masuk menjadi kawasan campuran. Bahkan, sebutan kawasan campuran itu sengaja dihembuskan agar mendapatkan alasan untuk merekomendasikan izin prinsip dari usaha tersebut. "Tidak ada istilah kawasan campuran, yang ada adalah kawasan pariwisata dan budidaya. Jadi kami minta hati-hati dan tidak gegabah memberikan rekomendasi izin prinsip yang kini dimohon oleh pihak perusahaan," katanya.

Susila dan Wakil Ketua

III DPRD Buleleng Made Adi Purnawijaya menambahkan, pihaknya sejak awal serius menyikapi usaha pencampuran beton cor di Desa Bungkulan. Usaha tersebut dinilai melanggar Perda No. 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Buleleng. Dalam perda ini diatur kalau Desa Bungkulan dan sekitarnya masuk dalam zone pariwisata dan budidaya. Namun faktanya P.T. Adi Jaya Beton memulai usahanya sejak beberapa bulan lalu dan belum mengurus dokumen perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Bahkan, Susila dan Adi memperkirakan pemerintah telah dirugikan karena perusahaan tidak dikenakan retribusi. Bahkan, sejak usaha itu beroperasi kondisi lingkungan sekitarnya juga mengalami gangguan yang serius.

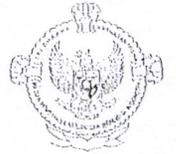
Tinjau Lokasi

Sementara itu, Tim Investasi Pemkab Buleleng meninjau lokasi pencampuran beton cor tersebut Kamis (10/9). Tim yang unsurnya dari berbagai instansi terkait ini telah mengumpulkan sejumlah fakta di lapangan. Hanya, hasil penelusurannya itu masih dikaji kembali, sebelum nantinya dimintakan petunjuk lebih lanjut kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.

Di lokasi tidak ditemukan aktivitas pencampuran beton. Hal ini karena status usaha ini masih disegel sampai pemiliknya mendapatkan dokumen perizinan dari pemkab. Sejumlah alat berat ditemukan di lapangan. Selain itu, pihak penanggung jawab dan sejumlah pekerjanya masih bertahan di lokasi. Setelah cukup lama mengamati langsung,

Edisi : Sabtu, 12 September 2015

Hal : 7



Sambungan - - -



Bali Post/kmb38

BETON - Tim investasi Pemkab Buleleng menelusuri keberadaan usaha pencampuran beton cor di Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kamis (10/9).

rombongan tim kemudian menggelar pertemuan di salah satu ruang kantor milik PT Adi Jaya Beton. Rombongan diterima oleh pihak penanggung jawab bernama Purnomo. Dari pertemuan itu, rombongan tim investasi ini hanya meminta keterangan dari pihak penanggung jawab terkait keberadaan usaha pembuatan beton cor tersebut. Hasil wawancara itu telah dicatat oleh tim investasi dan selanjutnya tim

akan merapatkan kembali untuk mengkaji hasil penelusurannya di lapangan.

Sekretaris Tim Investasi yang juga Kabag Ekonomi dan Pembangunan Sekkab Buleleng, I Ketut Suparto, mengatakan, sesuai ketentuan yang ada, tim melakukan penelusuran ke lokasi usaha untuk mendapatkan data dan fakta terkait aktivitas usaha yang dijalankan perusahaan. (kmb38)

Edisi : Sabtu, 12 September 2015
Hal : 7